

PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK OLEH DPD NASDEM KOTA DENPASAR MENJELANG PEMILIHAN UMUM 2024

Cesiliya Natasha¹, Gede Indra Pramana², Tedi Erviantono³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received July, 2025

Revised July, 2025

Accepted July, 2025

Available online July, 2025

cesiliya.natasha051@student.unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright ©2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan pelaksanaan pendidikan politik secara internal dan eksternal dari DPD Partai Nasional Demokrat Kota Denpasar menjelang pemilihan umum 2024. Tulisan berusaha mengungkapkan bentuk program pendidikan politik yang diimplementasikan oleh partai, hambatan yang ada, dan korelasinya terhadap penurunan jumlah kader yang berhasil menjadi anggota legislatif Kota Denpasar. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif melalui pengumpulan data dengan teknik wawancara yang menghasilkan sumber data primer; dan studi pustaka-pustaka terdahulu yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD Nasdem Denpasar melaksanakan pendidikan politik melalui program berbentuk seminar, diskusi, dan konsolidasi internal partai, yang kemudian menjadi modal para kadernya meneruskan pendidikan politik ke masyarakat. Meski pendidikan politik internal partai berjalan secara kontinu, basis edukasi seperti ini belum mampu dikonversi menjadi elektabilitas yang cukup karena adanya faktor-faktor lain.

Kata kunci: Pendidikan Politik; Partai Nasdem; Pemilihan Umum 2024

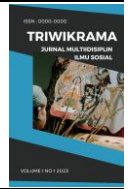
ABSTRACT

This research explains the implementation of political education both internally and externally by the DPD of the National Democrat Party in Denpasar City leading up to the 2024 general elections. The paper seeks to reveal the forms of political education programs implemented by the party, the existing obstacles, and their correlation to the decline in the number of cadres who successfully become legislative members in Denpasar City. The research method used is qualitative, involving data collection through interview techniques that produce primary data sources, and literature studies from previous works that serve as secondary data sources for the research. The results indicate that DPD Nasdem Denpasar conducts political education through programs in the form of seminars, discussions, and internal party consolidation, which then becomes the capital for its cadres to continue political education to the public. Although the internal political education within the party is ongoing, this educational foundation has not yet been able to be converted into sufficient electability due to other influencing factors.

Keywords: Political Education; Nasdem Party; 2024 General Election.

*Corresponding author

E-mail addresses: cesiliya.natasha051@student.unud.ac.id



1. PENDAHULUAN

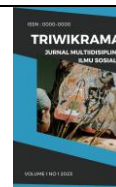
Jurnal ini akan menganalisis dan menjelaskan implementasi dari pendidikan politik kepada kader-kader maupun kepada publik oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Denpasar. Penulis berusaha untuk meneliti secara mendalam pendidikan politik yang dilakukan DPD Nasdem Denpasar mulai dari program, proses pelaksanaan, hambatan, dan korelasinya terhadap hasil pemilihan umum 2024 bagi para kader yang mencalonkan diri.

Partai politik merupakan salah satu instrumen penting dalam menjalankan demokrasi di Indonesia. Mengingat masyarakatnya yang multi kultur, partai-partai politik yang muncul di negara ini dilatar belakangi oleh beragam kepentingan, cita-cita, atau ideologi yang dianggap mampu mewakili serta memberikan solusi atas isu-isu di masyarakat. Menurut Budiardjo (2008), partai politik diisi oleh sekelompok orang yang memiliki ideologi sama dalam menentukan wakil yang akan mengisi jabatan-jabatan politik. Dari definisi tersebut, penulis menginterpretasikan bahwa pengelompokan orang dalam partai politik adalah sebuah upaya penggalangan kekuatan untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum.

Selain sarat akan kepentingan, partai politik pada dasarnya memiliki fungsi yang harus dijalankan dalam proses bernegara. Fungsi partai politik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa partai politik adalah sebagai sarana: (a) pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (b) penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat; (c) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (d) partisipasi politik warga negara; dan (e) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender (Indonesia, 2002).

Tulisan kali ini akan berfokus pada fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik secara internal maupun eksternal. Partai politik perlu memberikan pendidikan politik kepada kadernya melalui pengkaderan. Pendidikan politik secara internal ini berfungsi untuk mencetak kader berkompetensi yang mampu menyerap aspirasi masyarakat (Daud, 2019). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Heywood (2013) dalam Erviantono, bahwa partai politik harus membekali politisi dengan keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Selanjutnya, pendidikan politik masyarakat dilakukan untuk mencegah timbulnya konflik akibat perbedaan kepentingan. Implementasi fungsi partai politik ini mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak kewajibannya dalam sistem politik yang demokratis, sehingga kompetisi yang ada dapat dilakukan secara sehat (Sumanto & Haryanti, 2021). Dengan kata lain, kader partai merupakan agen penting yang akan berkomunikasi kepada publik terkait pendidikan politik, sehingga kompetensi kader memengaruhi keberhasilan suatu agenda politik.

Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan adalah dari hasil pemilu yang diperoleh partai Nasdem di Kota Denpasar. Kota Denpasar terbagi menjadi 5 daerah pemilihan dengan total alokasi kursi sejumlah 45. Dari data yang ditetapkan KPU Kota Denpasar, Partai Nasdem mengajukan calon legislatif sebanyak 100% dari total alokasi kursi di setiap Dapilnya. Pada akhirnya, Nasdem hanya mampu meloloskan satu anggotanya yaitu Drs. I Wayan Gatra, M.Si. yang berkompetisi di Dapil Denpasar 4 (KPU, 2024). Hal ini tidak sesuai dengan target yang ditentukan partai untuk memperoleh 5 kursi di DPRD (detikBali, 2023). Angka tersebut



menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah kader yang berhasil lolos bagi Partai Nasdem Kota Denpasar karena pada pemilu sebelumnya, Nasdem memiliki 3 wakil di dalam DPRD.

Penulis memilih hasil pemilihan umum sebagai *output* dari pendidikan politik yang dilakukan DPD Nasdem Denpasar karena adanya pernyataan bahwa masyarakat yang telah sadar akan hak dan kewajibannya dalam proses politik, dapat ditinjau dari partisipasinya saat pemilihan umum dilangsungkan (Suryani & Suryanef, 2022). Bagaimanapun, hal ini berkaitan dengan cara hadir dan komunikasi yang dilakukan partai kepada masyarakat saat melaksanakan pendidikan politik sehingga berpengaruh pada pengenalan publik terhadap simbol-simbol politik yang ada. Argumen di atas ditegaskan dengan hasil penelitian dalam jurnal (Mii et al., 2023) yang menunjukkan bahwa keanggotaan partai, pendidikan pelatihan, dan kampanye berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat. Lebih spesifik, pendidikan politik partai secara internal tentu memiliki korelasi terhadap kompetensi berpolitik para kadernya dalam konteks menjelang pemilihan.

DPD Nasdem Denpasar diketahui pernah menyelenggarakan kegiatan pendidikan politik bagi 312 kadernya pada bulan Februari 2023. Pendidikan politik tersebut dilakukan untuk mempersiapkan kader partai menjelang pemilihan umum. Kegiatan difokuskan untuk *upgrade* cara-cara berpolitik bagi kader Nasdem Kota Denpasar melihat adanya potensi besar pemilih dari kelompok usia milenial (Mahendra, 2023). Bentuk lain pendidikan politik Nasdem adalah dengan adanya lembaga pendidikan politik yang disebut Akademi Bela Negara (ABN), yang di dalamnya terdapat pengajaran pada aspek kepribadian, kepartaian, dan kebangsaan (Utomo et al., 2023). Pembekalan kader yang telah dilaksanakan tersebut terbukti belum mampu membuat publik memberikan kepercayaan lebih pada partai Nasdem Kota Denpasar, sehingga memunculkan pertanyaan bagi penulis, bagaimana pelaksanaan pendidikan politik dari partai Nasdem baik secara internal maupun eksternal?

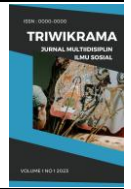
Penelitian serupa didapati pada jurnal berjudul “Peran Partai Nasdem dalam Pendidikan Politik di DKI Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019” yang ditulis oleh Utomo pada tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nasdem DKI Jakarta menyelenggarakan program pendidikan politik yang terstruktur dengan beberapa fasilitas yang diberikan untuk masyarakat. Implementasi pendidikan politik partai Nasdem tersebut bertujuan agar partai dapat mempertahankan dan memperluas basis konstituennya. Namun, peran Nasdem dalam hal pendidikan politik belum dirasakan secara signifikan dari sudut pandang masyarakat DKI Jakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara yang menghasilkan sumber data primer; dan studi pustaka-pustaka terdahulu yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian. Data-data tersebut dikumpulkan untuk mencari tahu pendidikan politik yang dilakukan oleh partai Nasdem Kota Denpasar untuk masyarakat dan kadernya menjelang Pemilu 2024. Lokasi wawancara berada di kantor DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Kota Denpasar, Jalan Letda Tantular Barat No. 15, Denpasar, Bali. Proses wawancara dilakukan pada tanggal 19 November 2024 bersama para pengurus DPD Nasdem Kota Denpasar yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai informan dalam penelitian. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan penelitian. Hasil penelitian adalah interpretasi penulis terhadap data-data yang sudah dianalisis dan disajikan

*Corresponding author

E-mail addresses: cesiliya.natasha051@student.unud.ac.id



dalam bentuk teks. Metode penelitian yang penulis jelaskan di atas diharapkan mampu menjawab rumusan masalah sehingga tujuan penelitian penulis dapat tercapai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pendidikan Politik DPD Nasdem Denpasar

Program Partai politik adalah elemen penting dalam kelangsungan negara demokrasi melihat kedudukannya yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan politik dari partai untuk masyarakat bertujuan agar publik memiliki pengetahuan politik yang pada akhirnya diwujudkan dalam kegiatan pemilihan umum (Kusuma et al., 2020). Partisipasi pemilih dalam pemilihan umum adalah salah satu indikator yang dapat digunakan dalam melihat keberhasilan pendidikan politik masyarakat. Masyarakat yang memiliki pengetahuan politik akan sadar dengan pentingnya proses pemilihan umum. Implementasi pemberian pendidikan politik oleh partai kepada masyarakat ini bagaimanapun tidak terlepas dari peran kader-kader partai politik. Maka dari itu, sebelum turun langsung ke masyarakat, partai perlu membekali para kadernya terlebih dahulu terkait hal yang sama.

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan selama melakukan wawancara secara langsung dengan para informan, DPD Nasdem Denpasar memiliki berbagai program dalam rangka pendidikan politik. Sebelum menguraikan apa saja program yang dilaksanakan, perlu diketahui bahwa rekrutmen kader partai adalah satu proses awal yang menjadi faktor signifikan atau tidaknya pendidikan politik partai. Anak Agung Ngurah Gede Widiada, yang menjabat sebagai ketua DPD menuturkan bahwa proses rekrutmen yang dilakukan partai masih belum maksimal karena kurangnya minat masyarakat terhadap politik:

“Jadi kami ya jujur memang kami kekurangan merekrut kader. Karena secara umum, orang itu tidak tertarik kepada politik. Ya sifatnya euforia saja. Sekadar untuk kumpul.” (Anak Agung Ngurah Gede Widiada, 19 November 2024).

Lebih lanjut informan menjelaskan minimnya minat masyarakat yang potensial menjadi kader untuk bergabung ke dalam partai politik adalah karena adanya anggapan bahwa politik bukan arena yang menguntungkan untuk dijadikan profesi. Selain itu, *cost* politik yang mahal juga membuat perekrutan kader sulit dilakukan. Kurang maksimalnya proses rekrutmen ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pendidikan politik dari partai Nasdem ke masyarakat. Meskipun demikian, partai Nasdem tetap berupaya melaksanakan proses rekrutmen kader dan pengurusnya secara sistematis dan berjenjang dari tingkatan yang paling kecil seperti di lingkup kelurahan.

Bagaimanapun, kader-kader yang ada tetap menerima dan melaksanakan program kerja terkait pendidikan politik. Pendidikan politik secara internal ini didapati melalui kegiatan-kegiatan seperti seminar, berbagai diskusi antar anggota partai, dan konsolidasi internal partai. Materi yang disampaikan pun beragam, mencakup pengenalan ideologi dan simbol partai, pemahaman tentang organisasi, kebijakan partai, keadaan partai di pemilihan umum di Indonesia, dan makna restorasi serta perubahan. Cara penyampaian materi terkait pendidikan politik internal tersebut dilakukan baik luar jaringan maupun dalam jaringan. Program edukasi ini ditujukan kepada para kader untuk mempersiapkan mereka turun ke lapangan yang konteksnya adalah sebelum pemilihan berlangsung. Hal ini dapat dilihat menjadi suatu kewajiban partai untuk membekali para kadernya dengan berbagai pemahaman teoritis sebelum mereka turun secara langsung ke masyarakat.



Setelah membekali para kader melalui pendidikan politik internal, partai Nasdem Denpasar juga melaksanakan pendidikan politik eksternal yang kaitannya memberikan pemahaman politik kepada masyarakat terlebih yang sudah memiliki hak pilih. Sekretaris DPD, A.A. Putu Sugiarta menuturkan bahwa kaitannya menjelang pemilihan umum 2024, pendidikan politik masyarakat kerap dilaksanakan melalui para kadernya yang juga memiliki status sebagai calon legislatif. Para kader Nasdem ini turun ke masyarakat melalui berbagai acara sosial seperti upacara-upacara adat, gotong royong, dan lain-lain. Selama dilakukan, masyarakat menyambut hadirnya kader partai dengan terbuka. Tetapi, hal ini tidak dapat menjadi satu tolak ukur yang pasti dalam menilai kecenderungan pilihan politik masyarakat. Hal ini sejalan dengan informasi yang dikemukakan ketua DPD, yang menanggapi kondisi pasca pemilihan, bahwasannya Nasdem adalah partai yang hanya berbasiskan edukasi, sehingga sulit untuk mendapat suara yang cukup di masyarakat Kota Denpasar.

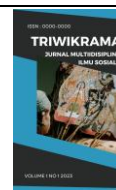
Korelasi Pendidikan Politik Partai dengan Hasil Pemilihan Umum

Perlu diingat bahwa dalam tulisan ini penulis melihat penurunan jumlah kader yang berhasil menjadi anggota legislatif kota sebagai sebuah masalah penelitian. Penulis berupaya untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana pelaksanaan pendidikan politik partai dan korelasinya terhadap hasil pemilu. Setelah mengetahui bentuk-bentuk program yang dilakukan, tidak bisa dipungkiri selama mengimplementasikan program pendidikan politik internal maupun eksternal tersebut, terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh partai. Hambatan tersebut didapati mulai dari proses rekrutmen kader yang sulit karena sikap skeptis dari masyarakat, kendala teknis yang kaitannya dengan kondisi politik di Bali, dan perlunya pendanaan yang tidak sedikit untuk melaksanakan program.

Informan berpendapat meskipun partai sudah memberikan pendidikan politik yang cukup untuk kadernya, posisi Nasdem dalam pemilihan 2024 di Bali kurang diuntungkan akibat dari pernyataan sikap partai secara sentral yang mendukung pasangan calon presiden nomor urut 1. Sudah diketahui secara umum bahwa partai yang mendominasi di wilayah Bali adalah PDI-P, dimana partai ini mengusung calon presiden lain dalam konteks pemilihan umum 2024 yang lalu. Isu yang mengarah ke partai Nasdem dari kalangan masyarakat ini dianggap informan sebagai satu faktor yang memengaruhi elektabilitas para kader partai yang mencalonkan diri. Dengan kata lain, meskipun Nasdem telah berupaya mengenalkan partainya ke masyarakat melalui pendidikan politik, *positioning* partai masih kurang kuat untuk menaikkan elektabilitas para kadernya di Denpasar.

Persaingan yang ketat dan sulit bagi partai dan para calon legislatifnya membuat pendidikan politik hanyalah satu faktor kecil yang memengaruhi kecenderungan para pemilih untuk memberikan suaranya kepada partai. Pendidikan yang diberikan dari partai Nasdem untuk para kadernya, khususnya yang menjadi calon legislatif, masih bersifat teoritis sehingga hal ini menjadi satu hambatan ketika para kader turun secara langsung ke masyarakat. Informan menuturkan bahwa kemampuan berpolitik para kadernya masih belum terasah secara maksimal, karena pemahaman teoritis sebelumnya, yang didapat dari pendidikan politik sulit untuk ditransformasi ke hal praktis di lapangan. Disamping itu, meskipun Nasdem memiliki Akademi Bela Negara yang menjadi wadah khusus untuk pendidikan politik kadernya, para anggota DPD Nasdem Denpasar ternyata belum pernah mengikuti program ini secara langsung.

Untuk menegaskan penjelasan penulis terkait kecilnya korelasi pelaksanaan pendidikan politik yang telah dilakukan partai Nasdem Denpasar dengan hasil pemilihan, perlu diketahui bahwa terdapat aktor lain dalam melakukan pendidikan politik selain partai politik. Hal ini



diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 36 Tahun 2010 pelaku pendidikan politik adalah partai politik dan partai politik lokal, organisasi kemasyarakatan, lembaga nirlaba lainnya, dan lembaga atau instansi vertikal di daerah. Partai politik adalah satu elemen yang melaksanakan pendidikan politik, oleh karena itu efektivitas pendidikan politik di masyarakat perlu ditinjau melalui pelaku pendidikan politik lain seperti yang sudah penulis sebutkan sebelumnya.

4. SIMPULAN

Pendidikan politik secara internal yang dilaksanakan oleh DPD Nasdem Kota Denpasar didapati melalui program-program seperti seminar, diskusi antar anggota partai, dan konsolidasi internal partai. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan ideologi dan simbol partai, pemahaman tentang organisasi, kebijakan partai, keadaan partai di pemilihan umum di Indonesia, dan makna restorasi serta perubahan. Cara penyampaian materi terkait pendidikan politik internal tersebut dilakukan baik luar jaringan maupun dalam jaringan. Terkait pendidikan politik eksternal, partai Nasdem menurunkan kader-kadernya melalui berbagai kegiatan sosial. Terdapat beberapa hambatan yang dialami partai selama melaksanakan pendidikan politik mulai dari proses rekrutmen kader yang sulit karena sikap skeptis dari masyarakat, kendala teknis yang kaitannya dengan kondisi politik di Bali, dan perlunya pendanaan yang tidak sedikit untuk melaksanakan program.

Pendidikan politik yang telah terlaksana menjelang pemilihan umum 2024 tersebut pada akhirnya memberikan kesimpulan jika korelasi antara pendidikan politik yang dilakukan partai dengan hasil pemilihan yang didapatkan adalah kecil. Meski pendidikan politik internal partai berjalan secara kontinu, basis edukasi seperti ini belum mampu dikonversi menjadi elektabilitas yang cukup. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti posisi partai dalam konteks pemilihan di Bali, kurang terasahnya kemampuan berpolitik para kader, sulitnya mentransformasi pemahaman teoritis kader yang didapatkan melalui pendidikan politik ke hal praktis yang ada di lapangan, dan pertimbangan lain bahwa pelaku pendidikan politik di Indonesia tidak hanya partai politik.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Daud, M. D. (2019). Partai Politik dan Pendidikan Politik (Studi atas Program Pendidikan Politik Partai Golongan Karya Kota Tangerang Selatan). In *Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Erviantono, T. (n.d.). *Sinergitas Kelembagaan Partai Politik dan Pemerintah dalam Peningkatan Kapasitas Partai Politik*.
- Indonesia, K. D. N. (2010). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/126305/permendagri-no-36-tahun-2010>
- Indonesia, P. P. (2002). *Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik*.
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P., & Suryani, L. P. (2020). Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 164-169.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2150.164-169>
- Mahendra, I. B. P. (2023). *Gelar Pendidikan Politik di Bali, Dewa Nyoman Budiasa: Pilih*



- Pemula Penentu Kebijakan 5 Tahun.* Tribun-Bali.Com.
<https://bali.tribunnews.com/2023/02/13/gelar-pendidikan-politik-di-bali-dewa-nyoman-budiasa-pemilih-pemula-penentu-kebijakan-5-tahun>
- Mii, R., Reza, M., & Latuda, F. (2023). Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik. *Jurnal Goverance and Politics (JGP)*, 3(2), 139-153.
- Sumanto, D., & Haryanti, A. (2021). *Pendidikan Politik* (Alinurdin & I. S. Utami (eds.)). Unpam Press.
- Suryani, R., & Suryanef. (2022). Program Pendidikan Politik oleh Partai Politik untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Menghadapi Pilkada 2020 (Studi pada DPD PAN dan DPS Gerindra di Nagari Talang Kabupaten Solok). *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(1), 46-54. <https://doi.org/10.24036/jecco.v2i1.10>
- Utomo, M. S. S., Rahmawati, R., & Ilmar, A. (2023). Peran Partai Nasdem Dalam Pendidikan Politik di DKI Jakarta Pasca Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 8(2), 52-72. <https://doi.org/10.52447/polinter.v8i2.5981>